



Kabar

RBP GCF REDD+ SULTENG OUTPUT2

Edisi 4 | 1-30 November 2025

Dinas Lingkungan Hidup
Sulawesi Tengah Percepat
Implementasi ProKlim

Upaya Penyelesaian Konflik
Tenurial di Kabupaten
Banggai Kepulauan

KPH Toili Baturube
Kabupaten Banggai
Fasilitasi Penguatan
Tata Kelola Hasil
Hutan Bukan Kayu

KPH Balantak Kabupaten Banggai

Sita Kayu **Illegal**

A vertical photograph on the left side of the page shows a man in a forest, shirtless and wearing dark shorts, using a red chainsaw to cut a large log. The log is lying on the ground, and the man is leaning over it. The background is filled with green foliage and trees.

PENGANTAR

Edisi ke-4 newsletter program RBP GCF REDD+ Output 2 di Sulawesi Tengah mengangkat cerita cerita penanganan konflik tenurial, pengembangan ProKlim dan pemanfaatan hutan. Bukan hanya dari sisi aparaturnya, melainkan juga masyarakat yang melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

Dari sisi aparaturnya pemerintah, program melakukan percepatan pengusulan ProKlim di tingkat Kab/Kota, untuk memastikan desa – desa yang memiliki kategori rentan terhadap perubahan iklim memiliki ketangguhan.

Program juga melalui KPH Pulau Peling melakukan identifikasi untuk memetakan potensi konflik tenurial yang sering muncul di kawasan hutan, baik akibat tumpang tindih klaim lahan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak sesuai ketentuan, maupun persoalan tata batas. Membahas strategi penyelesaian konflik secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan hutan.

Untuk perlindungan dan pengamanan hutan, KPH Balantak bersama masyarakat melakukan pencegahan terhadap aktivitas illegal logging, hal ini dilakukan agar hutan terlindungi dari kegiatan illegal dan pemanfaatan tanpa prosdur.

Sementara dari sisi pengelola PS dan KUPS, kegiatan dimulai dengan memfasilitasi tiga kelompok tani hutan (HKm

dan HD) dalam sosialisasi penerbitan SIPPUH sebagai syarat wajib dalam penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan, berdasarkan PERMENLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA. KPH Toili Baturube memulai langkah besar untuk memastikan agar kegiatan usaha pemanfaatan hutan memiliki prosedur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini, berhasil membangun kerjasama antara pihak swasta dan tiga kelompok KUPS dalam pengelolaan hutan pada pemanfaatan rotan dan damar. Kerja sama ini menaikkan status kelas KUPS dari Gold ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Platinum. KEMITRAAN selaku Lemtara program RBP GCF REDD+ output 2 yang dilaksanakan oleh BPD LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Provinsi Sulteng melihat upaya Bersama yang dilakukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas aktor tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah.

Karena KEMITRAAN percaya kesejahteraan akan dapat diwujudkan dengan segera jika semua aktor terlibat secara bermakna dalam proses tata kelola pemerintahan sebuah daerah, termasuk di dalamnya keterlibatan semua pihak dalam upaya perlindungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat disekitar hutan.

Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Percepat Implementasi ProKlim



Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak, mendorong inisiatif mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontribusi dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Dinas Lingkungan Hidup memfasili pendaftaran Program Komunitas Iklim (ProKlim) di empat kabupaten, yakni Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Tojo Una – Una.

Moh Natsir A Mangge, S.Hut, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah ProKlim baru yang melakukan kegiatan preservasi melalui pengelolaan air, pemanfaatan pekarangan, penanaman pohon dan pengelolaan sampah.

Kegiatan ini sekaligus mendaftarkan 12 Desa/ Kelurahan untuk menjadi ProKlim baru.

“Diharapkan semakin banyak Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dan lahirnya komunitas baru yang peduli terhadap perubahan iklim” ujarnya.

Edi Wicaksono, Kordinator Program PMU KEMITRAAN, menyebut pelaksanaan sosialisasi ProKlim akan dilakukan di empat zona. Selain zona Banggai, kegiatan juga akan dilaksanakan di zona Poso, zona Palu dan zona Toli – Toli.

“Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsolidasi dan menjangkau desa desa calon ProKlim baru yang ada di setiap kabupaten serta menyesuaikan kebutuhan anggaran,” jelasnya.

Beliau menyebut, bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, program RBP GCF REDD+ Sulteng mematok target 20 desa/kelurahan/komunitas yang rentan terhadap perubahan iklim berdasarkan data SIDIK. Kegiatan sosialisasi ProKlim di zona Banggai telah berkontribusi sebesar 30% terhadap capaian pengusulan ProKlim baru.

No	Desa	Kabupaten	Keterangan
1	Desa Ulubongka	Tojo Una - Una	On proses
2	Desa Bambu	Tojo Una - Una	On proses
3	Desa Bungayo	Tojo Una - Una	On proses
4	Desa Bulu	Kab Banggai	Terdaftar ke SRN PPI
5	Desa Ampera	Kab Banggai	Terdaftar ke SRN PPI
6	Kel Nambo	Kab Banggai	Terdaftar ke SRN PPI
7	Desa Suit	Banggai Kepulauan	On proses
8	Desa Momotan	Banggai Kepulauan	On proses
9	Desa Sumondung	Banggai Laut	On proses
10	Desa Monsongan	Banggai Laut	On proses
11	Desa Gonggong	Banggai Laut	Terdaftar ke SRN PPI
12	Desa Popisi	Banggai Laut	Terdaftar ke SRN PPI



Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial *di Kabupaten Banggai Kepulauan*



Konflik tenurial menjadi salah satu tantangan pengelolaan hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Data KPH Pulau Peling menyebut, saat ini konflik lahan lahan dan kawasan hutan di wilayahnya mencapai 8 ribuan hektar.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala KPH Pulau Peling, Bapak Ir. Nurudin SP., M.Si., IPU dalam sambutannya pada kegiatan workshop identifikasi dan pengendalian konflik tenurial di wilayah kawasan hutan Pulau Peling. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pihak, pemerintah daerah Kab Banggai Kepulauan (Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan BPN), Polres Banggai Kepulauan, Universitas Muhammadiyah, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan perwakilan kelompok tani hutan.

Hadir juga dalam diskusi masyarakat perwakilan

desa di sekitar kawasan hutan; Desa Manggalai, Desa Palam, Desa Gansal, Desa Mata, Desa Alakasing, Desa Kambutokan, Desa Liang, Desa Sosom, Desa Bolubung dan Desa Momotan.

Dalam sambutannya, Bapak Ir. Nurudin SP., M.Si., IPU juga menyebut bahwa pengendalian konflik tenurial merupakan langkah penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Hutan bukan hanya soal kayu dan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut hak dan kehidupan masyarakat sekitar. Melalui workshop ini, kita ingin mencari jalan tengah agar pengelolaan hutan bisa berjalan adil, lestari dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.



| Ir. Nurudin SP., M.Si., IPU
Kepala KPH Pulau Peling

Selain berdiskusi untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mencari alternatif penyelesaiannya, peserta juga mendapatkan pemahaman seputar pendekatan hukum, sosial, serta teknik mediasi dalam penyelesaian konflik tenurial.

Doni Moidady, Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Banggai Kepulauan, mengusulkan tiga strategi penyelesaian konflik kawasan hutan.

“Kita perlu pendekatan sosial-historis, melahirkan produk hukum yang melindungi hak masyarakat lokal, dan memastikan setiap kebijakan diambil dengan prinsip partisipatif serta kolaboratif,” tegas Doni.

Kiki Rizki Amalia Project Officer PMU KEMITRAAN menyampaikan kegiatan ini, diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun komitmen bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tenurial di kawasan hutan.

“Dengan terselenggaranya workshop ini, konflik lahan di kawasan hutan KPH Pulau Peling dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diminimalisir, sekaligus membuka jalan bagi pengelolaan hutan yang transparan, adil dan berkelanjutan,” ujarnya.





KPH Balantak Kabupaten Banggai Sita Kayu Illegal

[Image courtesy: block.com]

KPH Balantak melakukan Patroli di Desa Pangkalasiang, Kec Balantak Utara, Kabupaten Banggai sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait terjadinya kerusakan hutan melalui aktivitas illegal logging.

Bersama masyarakat, enam orang tim patroli KPH Balantak melakukan penyisiran di sekitar kawasan hutan. Hasilnya, ditemukan 77 balok kayu hutan berukuran 10 cm x 12 cm x 4 m, 10 cm x 12 cm x 4,3 m, 10 cm x 12 cm x 3 m, yang ditinggal pemiliknya di tempat penampungan kayu.

Anang Arif, S.H Kasie PKPM KPH Balantak, menyebut aktivitas ini merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam melakukan pengendalian terhadap aktivitas illegal logging. “Barang bukti akan kami sita dan amankan di tempat penyimpanan KPH Balantak, hal ini juga merupakan langkah penegakan hukum terhadap upaya perusakan hutan, serta memberi peringatan terhadap pelaku illegal logging,” ujarnya.

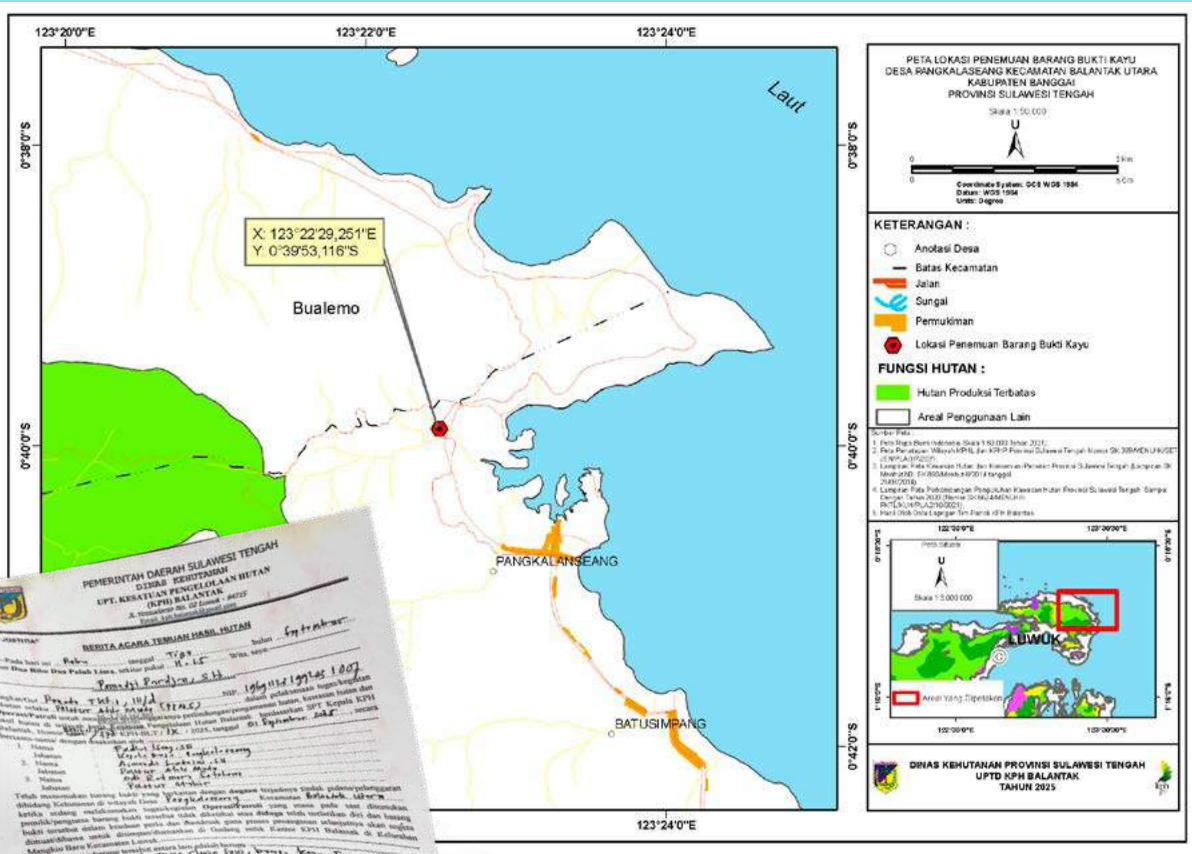
Tidak hanya melakukan penerbitan berita acara, proses penyitaan barang bukti melibatkan

masyarakat Desa Pangkalasiang, mulai dari pengangkutan kayu ke dalam truk hingga pengamanan.

Kiki Rizki Amalia, Project Officer PMU KEMITRAAN, program RBP GCF REDD+ Sulteng menyebut lembaganya mendukung penuh upaya perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan melalui fasilitasi sarana prasarana hingga operasional patroli. Hal ini dilakukan sebagai komitmen lembaganya mendukung pelestarian ekosistem hutan Sulawesi Tengah.

“Hutan Sulawesi Tengah memiliki fungsi peting dalam penyerapan karbon, maka penegakan hukum dan perlindungan sangat penting dilakukan,” jelasnya.

Selain menyita barang bukti, KPH Balantak sedang melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap pemilik kayu agar dapat diproses lebih lanjut. Laporan temuan barang bukti, juga telah dilaporkan ke Balai GAKKUM sebagai bentuk koordinasi ke penegak hukum kehutanan.



PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN
UPD KPH BALANTAK
KEPADA BUKTI KAYU

BERITA ACARA TEMUAN HASIL HUTAN

Tempat: Pangkajene-Weupea, 10/10/2023

1. Nama: ...
 2. Nama: ...
 3. Nama: ...
 4. Nama: ...

Telah melakukan temuan hasil hutan yang terdapat dalam dokumen yang terlampir dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi temuan hasil hutan yang terdapat dalam dokumen yang terlampir.

TANGGAS BERKUALITAS
 (Ditandatangani dan ditandatangani)

1. ...
 2. ...
 3. ...



| Anang Arif, S.H
 Kasie PKPM KPH Balantak





KPH Toili Baturube Kabupaten Banggai Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Hasil Hutan Bukan Kayu

KPH Toili Baturube fasilitasi penguatan tata kelola pencatatan dan pelaporan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (SIPPUH) kepada kelompok LPHD, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, pemerintah desa dan pelaku usaha yang akan menjadi mitra.

Untuk mendapatkan biling atau pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH), lembaga pengelola hutan negara perlu memperkuat lima segmen yang diatur dalam PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara, yaitu perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran/pengujian, pengumpulan dan pengangkutan/peredaran.

Kepala KPH Toili Baturube, Efendi S.Hut menyampaikan sosialisasi dan penerbitan SIPPUH ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kelompok LPHD dan pelaku usaha, sehingga dalam pemanfaatan hutan bukan kayu memiliki kualitas,

perencanaan dan pelaporan yang baik.

Perwakilan dari KPH Toili Baturube berbagi pengalaman dan mekanisme tentang metode pelaporan hasil panen, cara menghitung nilai ekonomi hutan dan menjaga serta mengembangkan kualitas hasil produksi.

Sementara itu, Kiki Rizki Amalia, Project Officer PMU KEMITRAAN, menyampaikan program RBP GCF REDD+ Sulteng memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas Pengelolaan Hutan Lestari melalui kegiatan paska izin.

“Pengelolaan Hutan Lestari merupakan salah satu output penting dalam program ini, agar perlindungan hutan sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara langsung,” ujarnya.

Berikut empat pelaku usaha telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan tiga LPHD untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Kelompok	Perusahaan	Jenis Pemanfaatan Hutan	Luas Ha	Durasi Kerja Sama
LPHD Momo	UD. Tujuh Harapan Baru (Rotan) dan CV. Rinjani Jaya (Damar)	Rotan dan Damar	200 Ha	5 Tahun
LPHD Uemea	UD. Putri Jaya Baru	Rotan	200 Ha	5 Tahun
LPHD Kolo	CV. Sumber Berkat Rotan	Rotan	200 Ha	5 Tahun



Samsudin dan Mimpi Sejahtera dari Hasil Hutan



Samsudin dan Kelompok LPHD Desa Uemea binaannya berhasil meningkatkan nilai ekonomi produk hutan bukan kayu dan status kelompoknya menjadi platinum. Prestasi ini dicapai kurang dari lima tahun setelah kelompoknya mendapatkan izin Perhutanan Sosial (PS) berdasarkan SK.1567/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/03/2021 dengan luas areal kelola 861 Ha.

Sejak menerima izin, Samsudin menggerakkan kelompoknya untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berfokus pada getah damar dan rotan mengingat potensi hutan desa di Uemea didominasi oleh rotan jenis Manau, Tohiti dan Semambu.

Dengan modal terbatas dan alat sederhana, kelompok Samsudin memanen rotan untuk dijual ke pengepul.

“Biasanya, persatu kali trip ke hutan hasilnya mencapai 3 – 4 Ton,” terang Samsudin.

Sesuai kesepakatan, hasil penjualan hasil rotan akan dibagi ke anggota, dan sisanya menjadi modal. “Akan tetapi, kadang hasil panen rotan masih kurang untuk sekadar mencukupi kebutuhan,” ungkapnya.

Samsudin menyebut proses pengambilan rotan memakan waktu sampai seminggu dan harus bermalam di tengah hutan. Ini menyebabkan hasil yang didapatkan hanya bisa untuk menutupi modal yang dikeluarkan.

“Dari pengambilan, pengangkutan ke tempat penimbangan membutuhkan waktu kurang lebih 2 – 3 jam melewati pengunungan dan Sungai,” sebutnya.

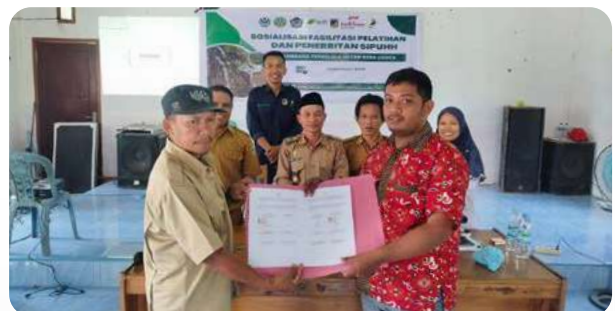
Awal Tahun 2025, KPH Toili Baturube mulai aktif melakukan pendampingan kepada kelompok pimpinan Samsudin. Selaku ketua, ia bersama pengurus kelompok selalu terlibat di setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPH, seperti membangun rencana usaha, sosialisasi penerbitan SIPPUH dan lain-lain.

Selain pelatihan, pendampingan dari KPH Toili Baturube juga membuka akses Samsudin dengan potensi berjejaring dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan nilai ekonomi hasil hutan kelompoknya.

“Usaha rotan dapat dikembangkan dengan membangun bekerjasama dengan berbagai pihak, sehingga persoalan modal dan pemasaran dapat terjamin, kelompok akan berkembang, hutan dimanfaatkan dengan dan ekonomi meningkat,” harap Samsudin.

Dengan dukungan KPH Toili Baturube, dua KUPS binaan Samsudin dan LPHD Uemea berhasil menandatangani kerja sama dengan perusahaan, yakni KUPS damar dengan CV. Junrejo Indah dan KUPS rotan dengan UD. Putri Jaya yang masing-masing akan berlaku selama lima tahun.

Bagi Samsudin dan anggota kelompoknya, kerja sama ini berarti harapan untuk sejahtera melalui pengelolaan hutan kian nyata. Kedepan, ia bersama kelompoknya bertekad untuk memastikan ekosistem hutannya lestari, agar rotan dan damar yang ada kian produktif.



Kabar RBP SULAWESI TENGAH

